

Peran PPKn Dalam Memperkuat Persatuan Indonesia di Balik Keberagaman Suku, Ras, Agama melalui Metode Discovery Learning

Purwani Puji Utami^{1*}, Andreas Andriansyah², Chalis Khairi Alfarizzi³, Raka Pangestu⁴

¹²³⁴Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Kusumanegara, Indonesia

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PPKn dalam memperkuat persatuan Indonesia di balik keberagaman suku,ras,agama melalui metode Discovery Learning. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka yang berasal dari riset Jurnal dan Artikel .Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PPKn sangat berperan dalam menjaga persatuan Indonesia karena PPKn mengajarkan generasi muda tentang pentingnya toleransi dan saling menghargai antar sesama anak bangsa melalui semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda beda tapi tetap satu jua yang di dalamnya terdapat Identitas Bangsa Indonesia yang saling terhubung satu sama lain, juga bermanfaat untuk menambah wawasan maupun kesadaran terhadap keberagaman yang sudah Indonesia miliki sejak lama dengan itu generasi muda akan tumbuh dengan rasa toleransi yang telah di tanamkan untuk menjaga persatuan Indonesia melalui PPKn.

Kata kunci:

Keberagaman,
Peran PPKn,
Persatuan dan Kesatuan.

Histori:

Dikirim: 20 Juli 2024
Direvisi: 30 September 2024
Diterima: 30 September 2024
Online: 2 Oktober 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Utami, PP., Andriansyah, A., Alfarizzi, CK., Pangestu, R. (2024). Peran PPKn Dalam Memperkuat Persatuan Indonesia di Balik Keberagaman Suku, Ras, Agama melalui Metode Discovery Learning. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 835-847.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku agama, ras dan bahasa sehingga tidak dipungkiri negara tersebut adalah negara yang memiliki kelebihan dan keunikan apabila dibandingkan dengan negara lain. Keberagaman tersebut akan menjadi boomerang apabila pemerintah maupun masyarakat tidak mampu merawat dan memeliharanya, sehingga melalui pendidikan khususnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diharapkan menjadi ujung tombak untuk membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia (Widiatmaka, 2021).

^{1*}Corresponding author.

E-mail: purwani_puji@stkipkusumanegara.ac.id

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, pada poin ketiga menyebutkan bahwa “Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat”. Ketetapan MPR-RI tersebut menunjukkan bahwa kemajemukan yang ada dapat mengancam persatuan-kesatuan bangsa dan negara Indonesia jika tidak dimaknai dan dibarengi sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat (Taniredja, 2021).

Saat ini, keberagaman lebih dianggap sebagai perbedaan yang diperparah dan dimanfaatkan oleh beberapa orang dalam mewujudkan kepentingan pribadi dan ambisikelompoknya. Hal ini menumbuhkan konflik horizontal dan kemerosotan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik horizontal, kekerasan etnis dan diskriminasi yang terjadi belakangan ini dapat membawa bangsa Indonesia di ambang kehancuran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang terencana untuk menginternalisasikan pemahaman tentang kedamaian, kemakmuran, cinta, rasa hormat, dan bahkan saling melindungi, inilah peran orang-orang yang baik hati dan berwawasan luas dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. (Sati, 2021) Namun apakah masyarakat Indonesia sendiri sudah benar-benar memahami arti kesatuan itu sendiri, dan apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia. Nyatanya konflik antar masyarakat masih banyak terjadi dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, salah satu konflik antar masyarakat yang sering kita jumpai adalah rasisme dan diskriminasi (Dewi, 2021).

Perbedaan sikap politik terhadap partai demokrasi juga menimbulkan konflik horizontal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif biasanya merupakan konflik yang tidak produktif. Tentunya sebagai negara yang beradab perlu kita perhatikan fenomena ini, karena pada umumnya bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan ciri persatuan, kesatuan, dan toleransi yang erat. Idealnya, perbedaan pilihan politik cukup untuk menyelesaikannya secara matang dan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tentu idealnya, upaya-upaya harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui pendidikan untuk memelihara dan melahirkan semangat toleransi, persatuan, saling menghormati dan cinta. (Sati, 2021). Untuk itu menanamkan nilai Toleransi pada peserta didik melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk modal sosial kognitif, karena toleransi merupakan sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di lingkungan sekitarnya.

Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat (Bakar, 2016). Adanya toleransi dalam masyarakat merupakan jaminan bagi setiap individu dapat segala macam kegiatan secara bebas dan bertanggung jawab dengan tidak melanggar nilai-nilai dan norma di masyarakat. namun juga karakteristik masyarakat atau rezim secara keseluruhan. Pemahaman terbaru tentang toleransi berasal dari teori demokrasi liberal. Toleransi terkait erat dengan norma-norma demokrasi - seperti hak warga negara untuk diperlakukan setara dalam keadaan yang sama; aturan mayoritas dan perlindungan hak minoritas - dan dengan rezim yang menyusun norma-norma ini (van Doorn, 2014).

maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.” Adapun di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan juga untuk membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara Warga Negara dengan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. Adapun fungsi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu: (a) Dapat mengembangkan dan melestarikan moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, berarti bahwa nilai dan moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa jati diri sebagai bangsa Indonesia yang kehilangan; (b) Dapat mengembangkan dan membina manususia Indonesia seutuhnya yang sadar, politik dan konstitusi Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (c) Dapat membina pemahaman dan kesadaran dan terhadap hubungan antara warga Negara dengan sesama warga negara dan pendidikan pendahuluan bela Negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan tentang keadaan Nusantara yang memiliki keberagaman, mulai dari ras, suku, agama dan budaya. Semboyan ini tentu mengingatkan kita bahwa semua negara Indonesia itu adalah satu kesatuan. Nilai-nilai pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat diterima oleh semua bangsa. perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. dalam arti bahwa pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri, karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur yang terkandung dan hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilainilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya. bahwa kebhinekaan dengan berbagai perbedaan yang terkandung adalah sesuatu yang nyata dan merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan harus dihadapi. Kita memperoleh pelajaran tentang satu hakekat, yang sesungguhnya telah ada sejak paham kebangsaan itu ditebar di tanah air kita. Bahwa kita memang berasal dari sesuatu yang banyak, dan penuh dengan perbedaan saja, malahan hanya menuntun kita masing-masing untuk tidak saling mengenal satu sama lain. Kita belajar sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu mengenal apa yang harus diakui dan dihormati, mengenal apa yang harus dirawat dengan hati-hati, dan menjembatani perbedaan-perbedaan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Ketika dahulu paham kebangsaan ditebarkan dengan harapan dapat mengekalkan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan penjajahan, untuk membangun satu bangsa yang utuh dan kuat, dan hidup dalam satu “NKRI”, ternyata pada saat yang sama juga menyimpan ancaman. Dan pertanyaannya sekarang adalah apa ancaman itu? Ternyata ancaman itu adalah bahaya bahwa tantangan terhadap persatuan dan kesatuan, tantangan terhadap satu NKRI bisa saja berasal dari dalam, yaitu dari kebhinekaan itu sendiri (Dewi, 2021).

Tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ watak tersebut menjadikan tugas bagi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam kehidupan peserta

didik. Sehingga dengan demikian transfer nilai karakter melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tersebut dapat mewarnai kehidupan peserta didik. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki bagian besar dalam menumbuhkan sikap toleransi. Tentunya dalam menumbuhkan sikap demikian dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tantangan yang berbedabeda pada setiap sekolah, hal tersebut karena setiap sekolah memiliki latar belakang pluralitas berbeda-beda dikalangan peserta didiknya. Tingkat pluralitas yang berbeda tersebut menjadikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) disetiap sekolah berbeda-beda dalam rangka menumbuhkan sikap toleransi. Dengan itu terciptalah Masyarakat yang demokratis yang memiliki kehidupan bersama di mana setiap warga, tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial, memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas. Martabat sebagai manusia bebas ini melahirkan manusia dengan segala hak-haknya, khususnya hak untuk memiliki keyakinan dan tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun juga. Masyarakat demokratis akan memiliki pemerintahan yang demokratis pula, yang bersandarkan pada kekuasaan dan bersumber pada kemampuan serta pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokratis akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga bangsa untuk memperoleh pendidikan. Sebab, semakin tinggi tingkat pendidikan warga bangsa, semakin kuat dan kokoh pemerintahan yang demokratis. Dalam masyarakat demokratis, lahir kesadaran bahwa kekuasaan akan aman apabila berada di tangan rakyat sendiri. Di samping itu, muncul pula kesadaran bahwa wewenang dan tugas-tugas pemerintahan tertentu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu pula. Dalam banyak hal, jabatan dan tugas-tugas tertentu tersebut akan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Dan warga masyarakat merelakan itu semua sepanjang kebijakan pemerintah tersebut tidak mencabut kebebasan, otonomi, dan martabatnya. Demokrasi adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bersama yang berdasarkan demokrasi tersebut memerlukan: (1) Suatu visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum dan undang-undang yang dipatuhi oleh setiap warga negara. (2) sistem hukum yang bersifat mandiri, adil, dan objektif. (3) sistem pemerintahan yang menghargai hak-hak setiap masyarakatnya. (4) tidak membedakan masyarakat dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan, disamping itu juga memberikan kesempatan yang adil kepada semua warga untuk melakukan mobilitas sosial. (5) kebebasan berpendapat dan berserikat benar-benar dijamin dan di lindungi oleh bangsa dan negara. (6) kebebasan untuk menentukan pilihan secara bebas dan adil tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Pada kenyataannya, masyarakat yang beretika pasti akan memfokuskan pada kepentingan publik, seperti solidaritas sosial, integrasi sosial yang tidak akan menumbuhkan konflik, tindakan diskriminatif dan tindakan negatif lainnya.

Peran PPKN Dalam Memperkuat Persatuan Indonesia Indonesia harus melihat bahwa sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, isu-isu sensitif seperti ras, agama, suku, lintas budaya, dan gender dapat dengan mudah menarik perhatian Indonesia. Dalam rangka pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan harus dijalankan seoptimal dan semaksimal mungkin, terutama dalam pembentukan moral siswa. Melalui rasionalisasi, kerangka ilmu pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan memberikan dukungan yang terkuat untuk mencapai pencapaian tersebut, sebab pendidikan kewarganegaraan mempunyai pusat penelitian yang universal yaitu pemikiran, moral dan nilai. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan seringkali diidentifikasi dengan pendidikan karakter atau pendidikan moral dan nilai, sebab pada hakikatnya adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang terang akal, serta memungkinkan mereka paham mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, dan bisa berguna bagi bangsa. Dengan nilai dan kemampuan pendidikan akhlaknya, PPKN memiliki kemampuan yang sanggup untuk menginternalisasikan nilai Pancasila kepada siswa siswi dan menciptakan kualitas moral siswa siswi yang berjiwa kepemimpinan. Etika yang ditempuh melewati PPKN dan pembelajaran sebagai pendidikan multikultural untuk menjadikan peserta didik yang memfokuskan pada integrasi etnis, kemudian melindungi ketentraman dalam masyarakat, dan juga mempertahankan nilai-nilai serta budaya yang hidup di lingkungan sekitar. Faktanya tidak mudah untuk mendidik siswa yang beretika, karena ini merupakan proses investasi yang berbudaya di Indonesia, oleh karena itu setiap tenaga pendidik khususnya yang mengajar pendidikan kewarganegaraann harus memiliki peran nyata untuk membentuk siswa Pancasila. Tentunya siswa Pancasila merupakan anak didik yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang spiritual, intelektual dan emosional. Untuk metode yang di gunakan dalam pembelajaran PPKN saya rasa metode Discovery Learning sangat cocok karena metode ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik, dan melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan.

Peserta didik akan meneliti informasi, memanipulasi objek, melaksanakan percobaan (eksperimen), melakukan diskusi atau debat, melihat sudut pandang lain, menanyakan sebuah pertanyaan yang lebih dalam dan luas, mendiskusikan gagasan-gagasan pengetahuan yang telah didapatkan dengan guru atau dosen. Perlu diketahui bahwa pengajaran discovery learning membutuhkan peran pendidik baik guru maupun dosen. Tugas pendidik pada pembelajaran ini di antaranya adalah memberikan tugas secara terbimbing dengan memanfaatkan berbagai teknik instruksional, peserta didik atau mahasiswa dituntut untuk bisa menjabarkan gagasan mereka, kemudian dosen akan mengomentari (feedback) dan menilai gagasan tersebut, guru bisa memberikan contoh cara dan bagaimana sebuah tugas atau pertanyaan diselesaikan. Aspek penentu kesuksesan pembelajaran discovery learning adalah keterlibatan pendidik. Senada dengan pernyataan Bruner, bahwa sebuah penemuan (discovery) tidak akan terjadi tanpa pengetahuan dasar (logika, hitungan, bahasa, dan sebagainya). Sementara Mayar, menyatakan bahwa penemuan tanpa pendukung lain harus dihilangkan, karena kurangnya pendukung akan memperlemah hasil penemuan. Selain itu, pembelajaran discovery tanpa bimbingan dan peran guru akan menyebabkan siswa frustrasi dan bingung. Dalam pelaksanaannya model discovery learning menurut Syahyakni: (1) Memberi rangsangan atau stimulus (stimulation) Yakni memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan peecahan masalah; (2) Mengidentifikasi masalah (problem statement) Yakni memberi kesempatan kepada

siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda- agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah); (3) Proses mengumpulkan data (data collection) Yakni memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak- banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis; (4) Proses pengolahan data (data processing) Mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan; (5) Pembuktian (verification) Yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, dihubungkan dengan hasil data processing; (6) Penarikan kesimpulan (generalization) Yakni menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Untuk itu metode discovery learning sangat cocok untuk membuat siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran PPKN namun perlu bimbingan guru agar siswa tidak bingung dan frustrasi dalam proses pembelajaran berlangsung (Mubasirin, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka atau dapat juga disebut sebagai studi kepustakaan, yaitu penelitian yang berdasarkan pada hasil analisa dari berbagai informasi yang sudah terpublikasikan sebelumnya. Sehingga dapat difungsikan sebagai tuntunan dalam mengkaji atau menganalisa suatu masalah penelitian sesuai pada tema yang digunakan, penelitian ini juga dilakukan pada Mei 2024. Didasarkan pada metode penelitian yang digunakan, penulisan dilakukan setelah mengumpulkan informasi tertentu agar objek di dalamnya dapat bersifat kepustakaan. Dan bila ditelisik dari sifatnya, maka penelitian untuk penulisan jurnal ini bersifat deskriptif yang berfokus pada penjelasan secara sistematis, berdasarkan pada fakta atau informasi yang sudah diperoleh. Sehingga, peneliti sudah mengetahui secara pasti dan jelas terkait objek dan sumber yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, yaitu dapat bersumber dari artikel dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa, sehingga tidak dipungkiri bahwa negara ini memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Keberagaman ini adalah kekayaan budaya yang memperkaya identitas nasional dan menjadi daya tarik tersendiri di mata dunia. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia menyajikan mosaik budaya yang sangat beragam, dimana setiap kelompok memiliki tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang khas.

Namun, keberagaman ini juga membawa tantangan yang kompleks. Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman tersebut dapat menjadi bumerang yang berpotensi memecah belah masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat memicu konflik sosial, politik, dan agama jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam merawat dan

memelihara keberagaman ini agar tetap menjadi sumber kekuatan dan persatuan bangsa.

Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting, khususnya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan sejak dini.

Menurut Widiatmaka (2021), Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang mampu menghargai keberagaman dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya persatuan, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang aktif menjaga dan memperkuat keutuhan bangsa.

Pendidikan yang berorientasi pada kebhinekaan juga berperan penting dalam mengurangi potensi konflik. Melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis, siswa dari berbagai latar belakang diajak untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dan kerja sama antarsiswa dari berbagai suku, agama, dan budaya akan memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Sekolah, dalam hal ini, berfungsi sebagai miniatur dari masyarakat Indonesia yang harmonis dan damai.

Guru juga memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai kebhinekaan. Sebagai teladan, guru harus menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian mereka. Mereka harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Melalui metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif, guru dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan.

Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional sangat penting untuk memastikan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia tetap menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan sebaliknya. Dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada nilai-nilai kebhinekaan, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap warga negara, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat tercapai.

berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR- RI) Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, pada poin ketiga menyebutkan bahwa “Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat”. Ketetapan MPR-RI tersebut menunjukkan bahwa kemajemukan yang ada dapat mengancam persatuan-kesatuan bangsa dan negara Indonesia jika tidak dimaknai dan dibarengi sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat (Taniredja, 2021).

Keberagaman merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, sayangnya saat ini keberagaman lebih sering dianggap sebagai perbedaan yang diperparah dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan ambisi kelompoknya. Hal ini tidak hanya mengancam persatuan, tetapi juga menumbuhkan konflik horizontal dan

kemerosotan bangsa Indonesia. Konflik horizontal, kekerasan etnis, dan diskriminasi yang terjadi belakangan ini sangat mengkhawatirkan dan dapat membawa bangsa Indonesia ke ambang kehancuran. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya yang terencana dan berkelanjutan dalam menginternalisasikan nilai-nilai kedamaian, kemakmuran, cinta, rasa hormat, dan saling melindungi di tengah masyarakat kita.

Nilai-nilai ini tidak hanya perlu dipahami secara teoritis, tetapi juga harus dihidupkan dalam tindakan sehari-hari. Pendidikan multikulturalisme, kampanye anti-diskriminasi, dan program-program yang mendorong interaksi antar kelompok etnis yang berbeda adalah beberapa langkah konkrit yang dapat diambil. Penting juga untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pemuda dalam upaya ini, sehingga pesan tentang pentingnya keberagaman dan harmoni sosial dapat tersebar luas dan mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia.

Inilah saatnya bagi orang-orang yang baik hati dan berwawasan luas untuk berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara yang positif. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, kita dapat memperkuat fondasi bangsa ini, menjadikannya lebih tahan terhadap perpecahan, dan memastikan bahwa kemerdekaan yang telah Andriansyah, Alfarizzi & Pangestu diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan kita dapat terus terjaga dan dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.

Peran aktif dalam mempromosikan perdamaian dan saling menghargai di tengah-tengah keberagaman merupakan bentuk nyata dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih harmonis dan bersatu, di mana perbedaan menjadi sumber kekuatan dan bukan alasan untuk berkonflik. Seperti yang diungkapkan oleh Lara Sati (2021), inilah tugas kita semua untuk menjaga dan merawat keberagaman demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Namun, apakah masyarakat Indonesia sendiri sudah benar-benar memahami arti kesatuan itu sendiri, dan apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia? Nyatanya, konflik antar masyarakat masih banyak terjadi dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" telah lama dijadikan pedoman, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan menuju kesatuan yang sejati masih penuh tantangan.

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, salah satu konflik antar masyarakat yang sering kita jumpai adalah rasisme dan diskriminasi. Dewi (2021) mengungkapkan bahwa isu-isu ini kerap muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, hingga diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik. Fenomena ini mencerminkan bahwa pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman belum sepenuhnya terinternalisasi dalam masyarakat.

Rasisme dan diskriminasi tidak hanya merusak hubungan antar individu dan kelompok, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan. Program-program edukasi yang menysasar semua lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga kampanye publik yang melibatkan media massa, dapat menjadi langkah efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku diskriminasi dan rasisme harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat.

Meskipun jalan menuju kesatuan yang utuh masih panjang, dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, kita bisa bergerak menuju masyarakat yang lebih harmonis dan bersatu. Dalam upaya ini, setiap individu memiliki peran penting, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas yang lebih luas. Dengan menumbuhkan rasa saling menghormati dan memahami, kita dapat mengatasi perbedaan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya bangsa Indonesia.

Jadi, mari kita renungkan kembali makna kesatuan dan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar satu, di mana setiap warga negara merasa diterima dan dihargai. Seperti yang dikatakan oleh Dewi (2021), tantangan terbesar kita adalah menghilangkan rasisme dan diskriminasi, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan dalam damai dan harmoni. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

perbedaan sikap politik terhadap partai demokrasi juga menimbulkan konflik horizontal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif biasanya merupakan konflik yang tidak produktif. Tentunya sebagai negara yang beradab perlu kita perhatikan fenomena ini, karena pada umumnya bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan ciri persatuan, kesatuan, dan toleransi yang erat. Idealnya, perbedaan pilihan politik cukup untuk menyelesaikannya secara matang dan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tentu idealnya, upaya-upaya harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui pendidikan untuk memelihara dan melahirkan semangat toleransi, persatuan, saling menghormati dan cinta. (Sati, 2021).

Untuk itu menanamkan nilai Toleransi pada peserta didik melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk modal sosial kognitif, karena toleransi merupakan sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di lingkungan sekitarnya. (Bakar, 2016) mengatakan bahwa “toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat”. Adanya toleransi dalam masyarakat merupakan jaminan bagi setiap individu dapat segala macam kegiatan secara bebas dan bertanggung jawab dengan tidak melanggar nilai-nilai dan norma di masyarakat. namun juga karakteristik masyarakat atau rezim secara keseluruhan. Pemahaman terbaru tentang toleransi berasal dari teori demokrasi liberal. Toleransi terkait erat dengan norma-norma demokrasi - seperti hak warga negara untuk diperlakukan setara dalam keadaan yang sama; aturan mayoritas dan perlindungan hak minoritas - dan dengan rezim yang menyusun norma-norma ini (van Doorn, 2014).

Tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ watak tersebut menjadikan tugas bagi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam kehidupan peserta didik. Sehingga dengan demikian transfer nilai karakter melalui pembelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tersebut dapat mewarnai kehidupan peserta didik. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki bagian besar dalam menumbuhkan sikap toleransi. Tentunya dalam menumbuhkan sikap demikian dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tantangan yang berbedabeda pada setiap sekolah, hal tersebut karena setiap sekolah memiliki latar belakang pluralitas berbeda-beda dikalangan peserta didiknya.

Tingkat pluralitas yang berbeda tersebut menjadikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di setiap sekolah berbeda-beda dalam rangka menumbuhkan sikap toleransi. Dengan itu terciptalah Masyarakat yang demokratis yang memiliki kehidupan bersama di mana setiap warga, tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial, memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas. Martabat sebagai manusia bebas ini melahirkan manusia dengan segala hak-haknya, khususnya hak untuk memiliki keyakinan dan tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun juga.

Masyarakat demokratis akan memiliki pemerintahan yang demokratis pula, yang bersandarkan pada kekuasaan dan bersumber pada kemampuan serta pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokratis akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga bangsa untuk memperoleh pendidikan. Sebab, semakin tinggi tingkat pendidikan warga bangsa, semakin kuat dan kokoh pemerintahan yang demokratis. Dalam masyarakat demokratis, lahir kesadaran bahwa kekuasaan akan aman apabila berada di tangan rakyat sendiri.

Di samping itu, muncul pula kesadaran bahwa wewenang dan tugas-tugas pemerintahan tertentu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu pula. Dalam banyak hal, jabatan dan tugas-tugas tertentu tersebut akan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Dan warga masyarakat merelakan itu semua sepanjang kebijakan pemerintah tersebut tidak mencabut kebebasan, otonomi, dan martabatnya.

Demokrasi adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bersama yang berdasarkan demokrasi tersebut memerlukan: (1) Suatu visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum dan undang-undang yang dipatuhi oleh setiap warga negara. (2) sistem hukum yang bersifat mandiri, adil, dan objektif. (3) sistem pemerintahan yang menghargai hak-hak setiap masyarakatnya. (4) tidak membedakan masyarakat dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan, disamping itu juga memberikan kesempatan yang adil kepada semua warga untuk melakukan mobilitas sosial. (5) kebebasan berpendapat dan berserikat benar-benar di jamin dan di lindungi oleh bangsa dan negara. (6) kebebasan untuk menentukan pilihan secara bebas dan adil tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

Pada kenyataannya, masyarakat yang beretika pasti akan memfokuskan pada kepentingan publik, seperti solidaritas sosial, integrasi sosial yang tidak akan menumbuhkan konflik, tindakan diskriminatif dan tindakan negatif lainnya. Indonesia harus melihat bahwa sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, isu-isu sensitif seperti ras, agama, suku, lintas budaya, dan gender dapat dengan mudah menarik perhatian Indonesia. Dalam rangka pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan harus dijalankan seoptimal dan semaksimal mungkin, terutama dalam pembentukan moral siswa. Melalui rasionalisasi, kerangka ilmu

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memberikan dukungan yang terkuat untuk mencapai pencapaian tersebut, sebab pendidikan kewarganegaraan mempunyai pusat penelitian yang universal yaitu pemikiran, moral dan nilai.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan seringkali diidentifikasi dengan pendidikan karakter atau pendidikan moral dan nilai, sebab pada hakikatnya adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang terang akal, serta memungkinkan mereka paham mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, dan bisa berguna bagi bangsa. Dengan nilai dan kemampuan pendidikan akhlaknya, PPKN memiliki kemampuan yang sanggup untuk menginternalisasikan nilai Pancasila kepada siswa siswi dan menciptakan kualitas moral siswa siswi yang berjiwa kepemimpinan. Etika yang ditempuh melewati PPKN dan pembelajaran sebagai pendidikan multikultural untuk menjadikan peserta didik yang memfokuskan pada integrasi etnis, kemudian melindungi ketentraman dalam masyarakat, dan juga mempertahankan nilai-nilai serta budaya yang hidup di lingkungan sekitar. Faktanya tidak mudah untuk mendidik siswa yang beretika, karena ini merupakan proses investasi yang berbudaya di Indonesia, oleh karena itu setiap tenaga pendidik khususnya yang mengajar pendidikan kewarganegaraann harus memiliki peran nyata untuk membentuk siswa Pancasila.

Tentunya siswa Pancasila merupakan anak didik yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang spiritual, intelektual dan emosional. Untuk metode yang di gunakan dalam pembelajaran PPKN saya rasa metode Discovery Learning sangat cocok karena metode ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik, dan melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan.

Peserta didik akan meneliti informasi, memanipulasi objek, melaksanakan percobaan (eksperimen), melakukan diskusi atau debat, melihat sudut pandang lain, menanyakan sebuah pertanyaan yang lebih dalam dan luas, mendiskusikan gagasan-gagasan pengetahuan yang telah didapatkan dengan guru atau dosen. Perlu diketahui bahwa pengajaran discovery learning membutuhkan peran pendidik baik guru maupun dosen. Tugas pendidik pada pembelajaran ini di antaranya adalah memberikan tugas secara terbimbing dengan memanfaatkan berbagai teknik instruksional, peserta didik atau mahasiswa dituntut untuk bisa menjabarkan gagasan mereka, kemudian dosen akan mengomentari (feedback) dan menilai gagasan tersebut, guru bisa memberikan contoh cara dan bagaimana sebuah tugas atau pertanyaan diselesaikan. Aspek penentu kesuksesan pembelajaran discovery learning adalah keterlibatan pendidik. Senada dengan pernyataan Bruner, bahwa sebuah penemuan (discovery) tidak akan terjadi tanpa pengetahuan dasar (logika, hitungan, bahasa, dan sebagainya).

Dalam pelaksanaanya model discovery learning menurut Syahyakni: 1. Memberi rangsangan atau stimulus (stimulation) Yakni memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan peecahan masalah; 2. Mengidentifikasi masalah (problem statement) Yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda- agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah); 3. Proses mengumpulkan data (data collection) Yakni memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak- banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis; 4. Proses pengolahan data (data processing) Mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan; 5. Pembuktian (verification) Yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, dihubungkan dengan hasil data processing; 6. Penarikan kesimpulan (generalization) Yakni menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Untuk itu metode discovery learning sangat cocok untuk membuat siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran PPKN namun perlu bimbingan guru agar siswa tidak bingung dan frustrasi dalam proses pembelajaran berlangsung (Mubasirin, 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian kami yang bersumber dari artikel dan jurnal dapat disimpulkan bahwa Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, ras, dan agama. Melalui penerapan metode Discovery Learning, pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari, menemukan, dan memahami informasi, PPKN dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang inklusif. Metode Discovery Learning memungkinkan siswa untuk lebih memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan Indonesia melalui pengalaman langsung dalam memahami perbedaan budaya, suku, dan agama. Dengan demikian, PPKN tidak hanya menjadi mata pelajaran formal, tetapi juga menjadi wahana untuk memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman yang kaya di Indonesia. Dengan pendekatan ini, siswa dapat lebih memahami pentingnya toleransi, kerjasama lintas budaya, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai landasan utama dalam membangun persatuan bangsa. Melalui metode Discovery Learning, PPKN dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang pluralitas Indonesia dan komitmen untuk memperkuat persatuan tanpa mengabaikan keberagaman yang ada. Dengan demikian, integrasi antara Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) dan metode Discovery Learning menjadi kunci dalam memperkuat persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, ras, dan agama, serta membentuk warga negara yang inklusif, toleran, dan memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kuat.

REFERENSI

- Bakar, A. (2016). *Konsep toleransi dan kebebasan beragama. TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi*, 123-131.
- Dewi, A. D. (2021). *Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka. Jurnal Kewarganegaraan*, 212.

- Lara Sati, D. A. (2021). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pendidikan Multikultural*.
Jurnal Pendidikan Tambusai, 904-910.
- mubasirin, s. I. (2022). *Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning pada MKWU Pendidikan Pancasila Merdeka Belajar di Lingkungan Universitas Islam Indonesia pada Semester Ganjil 2021/2022*. *jurnal uii*, 485 -506.
- Tukiran Taniredja, D. W. (2021). *Hubungan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan*. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1.
- van Doorn, M. (2014). *The nature of tolerance and the social circumstances in which it emerges*.
905–927.
- Widiatmaka, P. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Ujung Tombak*. *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 01, No. 02, Oktober 2021, halaman 176-185